



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II

Jl. Raya Serang KM.I Curugsawer Pandeglang-Banten



KATA PENGANTAR



Seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah akhir tahun kerja atau berakhirnya tahun anggaran berjalan, Pengadilan Negeri Pandeglang menyusun LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Setelah berakhirnya tahun 2022, Pengadilan Negeri Pandeglang membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2022.

LKJIP ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKJIP ini disusun untuk memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

LKJIP Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2022 disusun sesuai dengan Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Pandeglang dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2020. LKJIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, peranan dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan Pengadilan Negeri Pandeglang yang dipercayakan oleh publik. LKJIP ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2022, kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tentu masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pandeglang



selama Tahun 2022. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Pandeglang ke depan dan guna mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Pengadilan Negeri Pandeglang di masa yang akan datang.

Kami berharap, semoga dengan adanya LKJIP Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2022 ini dapat memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung RI. Kami juga berharap agar LKJIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita semua khususnya seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu penyusunan LKJIP ini.

Pandeglang, 15 Februari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang



Hendhy Eka Chandra, S.H.
NIP. 198105052003121001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta guna memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP, maka Pengadilan Negeri Pandeglang yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang memberikan pertanggungjawaban kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2022 merupakan hasil Pencapaian Kinerja selama tahun 2022 yang diukur dengan membandingkan Rencana Kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan secara utuh dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Pandeglang, maka telah disusun dan ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Pandeglang pada Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu :

1. DIPA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI (417844) sebesar Rp. 6.466.244.000,-



DAFTAR ISI

L K J I P	i
KATA PENGANTAR	ii-iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii-ix
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Isu Strategis	6
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II	8
A. Rencana Strategis	8
B. Indikator Kinerja Utama	11
C. Rencana Kinerja Tahun 2022	12
D. Penetapan Kinerja Tahun 2022	13
BAB III	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	39
BAB IV	43
A. Penutup	43

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1 Target, realisasi dan capaian persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan Tahun 2021 dan Tahun 2022	16
Grafik III.2 Target, realisasi dan capaian persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan Tahun 2021 dan Tahun 2022	17



Grafik III.3 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021 dan Tahun 2022	19
Grafik III.4. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ..	20
Grafik III.6. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	22
Grafik III.7. Target, realisasi dan capaian persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi	23
Grafik III.8. Target, realisasi dan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	24
Grafik III.9. Target, realisasi dan capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	27
Grafik III.10. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	28
Grafik III.11. Target, realisasi dan capaian persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu	30
Grafik III.12. Target, realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan	31
Grafik III.14. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	32
Grafik III.13. Target, realisasi dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)	34
Grafik III.15. Target, realisasi dan capaian persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	35
Grafik III.16. Persentase Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2022	42



2. DIPA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI (417845) sebesar Rp. 144.420.000,- Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pandeglang, maka akan diinformasikan laporan pencapaian hasil kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang selama tahun 2022. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dilihat melalui sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian terhadap target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		• Pidana	100 %	100 %	100 %
		• Perdata	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
• Perdata	84 %	88,4 %	104,81 %		
• Pidana	93 %	99,92 %	109,8 %		
3. Persentase penurunan sisa perkara :					
• Perdata	100 %	11,9 %	11,9 %		
• Pidana	100 %	11,9 %	11,9 %		
4. Persentase perkara yang tidak					



		mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding 86 % ▪ Kasasi 86 % ▪ PK 86 % 	86 % 86 % 86 %	98,38 % 98,38 % 98,38 %	117,12 % 117,12 % 117,12 %
		5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10 %	0 %	0 %
		6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73 %	90,83 %	127,92 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	92 %	100 %	111,11 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	14 %	3,13 %	26,08 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	10 %	0 %	0 %



	Masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90 %	0 %	0 %



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Pandeglang merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama. Tugas dan fungsi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Pandeglang dituntut untuk dapat melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *good governance*. Tanggung jawab tersebut dilaporkan secara tertulis, dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menyampaikan informasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun yang disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yang akuntabel dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP sebagai cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.



Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk layanan instansi / lembaga kepada masyarakat pencari keadilan, maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk kedalam jajaran aparatur peradilan.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai salah satu satuan kerja yang ada di lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung RI juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur untuk hasil yang akan dicapai.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 beserta penjelasannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Pandeglang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :



1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama
2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
3. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pandeglang yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
5. Fungsi Mediator, sebelum memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)
6. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian organisasi dan tatalaksana, sub bagian umum dan keuangan dan sub bagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan
7. Fungsi tambahan lainnya :



- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan
- b. Menyenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi harus menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi serta hubungan wewenang pelaporan.

Organisasi Mahkamah Agung RI didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI
6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan



Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi di bidang teknis yudisial
2. Menyelenggarakan administrasi di bidang non teknis yudisial (administrasi umum)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Pandeglang tergambar dalam lampiran laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan

Jabatan Pimpinan Pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua

2. Jabatan Teknis Yudisial

Jabatan di bidang teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang terdiri dari :

1. Hakim
2. Jabatan Struktural Teknis Yudisial :
 - a. Panitera
 - b. Panitera Muda Perdata
 - c. Panitera Muda Pidana
 - d. Panitera Muda Hukum
3. Jabatan Fungsional :
 - a. Panitera Pengganti
 - b. Juru Sita / Juru Sita Pengganti



3. Jabatan Non Teknis Yudisial

Jabatan di bidang non teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum terdiri dari :

1. Jabatan Struktural Non Teknis Yudisial :
 - a. Sekretaris
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. Jabatan Fungsional :
 - a. APBN

D. Isu Strategis

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Pandeglang antara lain :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan baik di bidang teknis maupun non teknis peradilan
2. Masih terdapat beberapa orang Panitera Pengganti yang memiliki pekerjaan rangkap sehingga dapat menyebabkan lambatnya performa penyelesaian pekerjaan
3. Masih kurangnya anggaran yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah diajukan
4. Perkara yang di upayakan diselesaikan melalui mediasi tidak seluruhnya menjadi akte perdamaian.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk memaparkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana



kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtiar perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun anggaran 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

da sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja

2. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai salah satu lembaga penegakan hukum pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran penting dalam Reformasi Birokrasi Peradilan yang merupakan payung perubahan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Pandeglang adalah garda terdepan dalam Reformasi Birokrasi Peradilan yang berkaitan erat dengan pelayanan publik terutama pihak pencari keadilan dan pengguna pengadilan.

Sebagai upaya pengembangan pengelolaan administrasi yang bijak dan tuntutan *stakeholders* atas perbaikan kinerja dan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pandeglang telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang menjadi komitmen bersama. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 -2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

1. Visi Dan Misi

Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas Pengadilan mempunyai visi:

"MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG YANG AGUNG"

Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Pandeglang mempunyai misi, yaitu:



“Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum, meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan dan mewujudkan kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan”. Dengan menjalankan seluruh kegiatan melalui program-program yang disesuaikan dengan rencana kerja Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang dimaksud visi dan misi Mahkamah Agung RI, dengan mempertegas visi Mahkamah Agung, yakni : “Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Pandeglang. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepastian Hukum
2. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan

Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Pandeglang telah menentukan rencana strategis. Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



3. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan disini adalah tindakan nyata yang dilakukan Pengadilan Negeri Pandeglang pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Kegiatan pokok dari program yang utama tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2020 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Didalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya Mahkamah Agung disediakan anggaran untuk melakukan :

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
- c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Didalam program peningkatan sarana dan prasarana disediakan anggaran untuk melakukan pengadaan perangkat pendukung sarana prasana.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Didalam program peningkatan manajemen Peradilan Umum disediakan anggaran untuk penanganan perkara meliputi Pemanfaatan Pos Bantuan Hukum serta Penyelesaian Administrasi Perkara ditingkat Pertama dan Banding dan Penyelesaian Administrasi Perkara ditingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Di bidang administrasi tentunya harus menunjang bidang teknis peradilan sehingga di perlukan rencana kinerja yang baik. Di Pengadilan Negeri Pandeglang



sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik, artinya suatu sistem pengelolaan anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti dibawah ini:

- Realistis, perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana
- Transparan, terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran
- Sesuai dengan peruntukannya, artinya dana publik dibelanjakan sesuai dengan peruntukkan yang telah ditetapkan
- Laporan yang benar dan baik, laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran aktual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
- Adanya pengawasan dan audit, pengawasan dan audit baik oleh pihak luar maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan
- Kepastian tersedianya dana, unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dana
- Taat peraturan, artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan
- Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKAKL) maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis)
- Adanya ukuran atas output dan outcome yang menunjukkan kinerja

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis



dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

Kinerja utama adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam kinerja utama dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

C. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun Anggaran 2022 ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Selengkapnya mengenai Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun Anggaran 2022 terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.



D. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Pandeglang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2022 terlampir dalam lampiran LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Pengadilan Negeri Pandeglang telah melakukan beberapa analisa dan evaluasi terhadap kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Adapun Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2022 ditampilkan pada data berikut ini :



a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

➤ Perdata

Persentase sisa perkara perdata Pengadilan Negeri Pandeglang yang diselesaikan pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2021	Putus Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian
1	Perdata	9	9	100 %	100 %	100 %
Total		9	9			

Pada Tahun 2021 terdapat sisa 9 perkara perdata yang harus diselesaikan pada tahun 2022. Semua perkara sisa tersebut telah diselesaikan pada Tahun 2022.

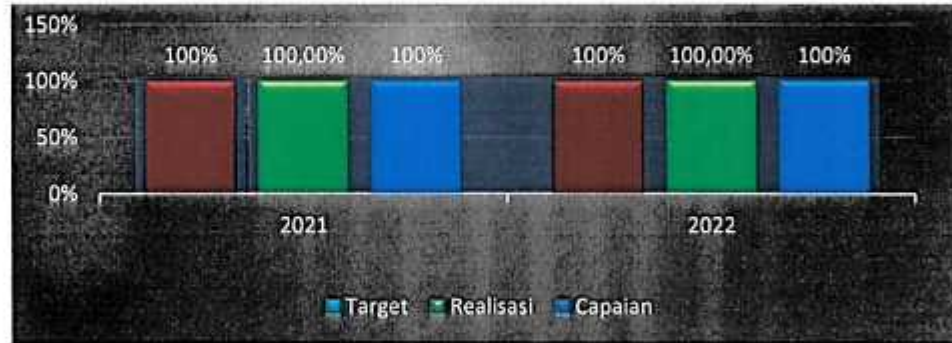
Pada tahun sebelumnya, persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2020	Putus Tahun 2021	Target	Realisasi	Capaian
1	Perdata	28	28	100 %	100 %	100 %
Total		28	28			

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat sisa perkara perdata di tahun 2021 yang harus diselesaikan pada tahun 2022. Pencapaian indikator kinerja persentase sisa perkara perdata pada tahun 2022 sebesar 100%, dan pencapaian pada tahun 2022 juga mencapai 100%, persentase capaian penyelesaian sisa perkara pada tahun 2022 tetap sama dengan tahun 2021 hal ini disebabkan Pengadilan Negeri Pandeglang segera menyelesaikan sisa perkara perdata pada tahun 2021 yang diselesaikan pada tahun 2022.



Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.1 Target, realisasi dan capaian persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan Tahun 2021 dan Tahun 2022

➤ Pidana

Persentase sisa perkara pidana Pengadilan Negeri Pandeglang yang diselesaikan pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2021	Putus Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	13	13	100 %	100 %	100 %
2	Lalu lintas	66	66			
Total		79	79			

Pada Tahun 2021 terdapat sisa 13 perkara pidana biasa dan 66 perkara lalu lintas yang harus diselesaikan pada tahun 2022. Semua perkara sisa tersebut telah diselesaikan pada Tahun 2022.

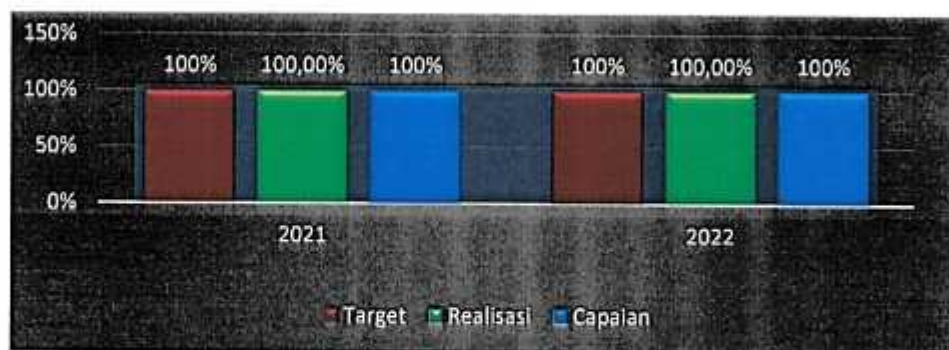
Pada tahun sebelumnya, persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dapat dilihat pada tabel berikut :



No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2020	Putus Tahun 2021	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	28	28	100 %	100 %	100 %
2	Pra Peradilan	-	-			
Total		28	28			

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat sisa perkara pidana di tahun 2021 yang harus diselesaikan pada tahun 2022. Pencapaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana pada tahun 2022 sebesar 100%, dan pencapaian pada tahun 2022 juga mencapai 100%, persentase capaian penyelesaian sisa perkara pada tahun 2022 tetap sama dengan tahun 2021 hal ini disebabkan Pengadilan Negeri Pandeglang segera menyelesaikan sisa perkara pidana pada tahun 2021 yang diselesaikan pada tahun 2022.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.2 Target, realisasi dan capaian persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan Tahun 2021 dan Tahun 2022



b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

➤ Perdata

Persentase perkara perdata Pengadilan Negeri Pandeglang yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2022	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	22	15	7	84 %	68,18 %	81,16 %
2	Permohonan	21	21	0	84 %	100 %	119,04 %
3	Gugatan Sederhana	8	8	0	84 %	100 %	119,04 %
Total		51	44	7			
Rata – Rata Capaian					84 %	86,27%	102,70 %

Dari total 22 perkara perdata yang putus pada tahun 2022, terdapat 7 perkara perdata Gugatan yang diputus tidak tepat waktu.

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2021	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	33	10	23	80 %	30,30 %	37,87 %
2	Permohonan	17	5	11	80 %	100 %	125 %
3	Gugatan Sederhana	66	5	59	80 %	100 %	125 %
Total		116	20	93			
Rata – Rata Capaian					80 %	17,24 %	21,55 %

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dari total 22 perkara perdata yang putus pada tahun 2022, terdapat 7 perkara perdata Gugatan yang diputus tidak tepat waktu. Rata – rata capaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 102,70 %, melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 84%, sedangkan rata – rata capaian pada tahun 2021 sebesar 21,55 %, terdapat kenaikan capaian pada tahun 2022 sebesar 81,15% dibandingkan tahun 2021 hal ini Pengadilan Negeri Pandeglang berhasil mengurangi jumlah perkara perdata yang diputus tepat waktu pada tahun 2022.



Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.3 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021 dan Tahun 2022

➤ Pidana

Persentase perkara pidana Pengadilan Negeri Pandeglang yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2022	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Biasa	259	249	13	93 %	96,13 %	103,36 %
2	Cepat	2	2	0	93 %	100 %	107,52 %
3	Anak	14	14	0	93 %	100 %	107,52 %
4	Pra Peradilan	1	1	0	93 %	100 %	107,52 %
Total		276	266	13			
Rata – Rata Capaian					93 %	96,37 %	103,62 %

Dari total 259 perkara pidana yang putus pada tahun 2022, terdapat 13 perkara pidana Biasa yang diputus tidak tepat waktu.

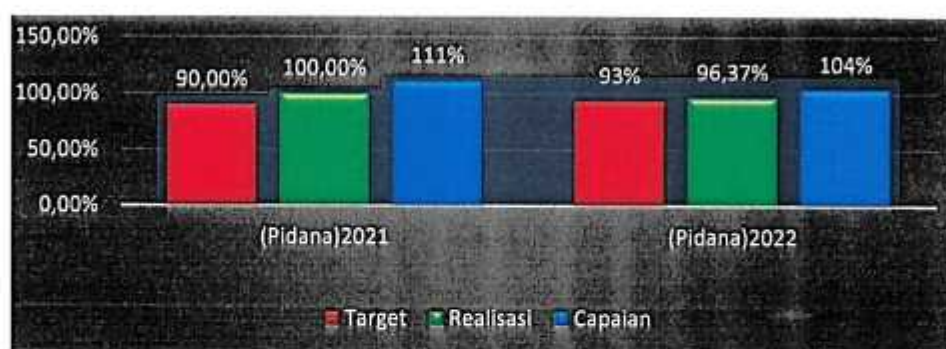
Pada tahun sebelumnya, persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dapat dilihat pada tabel berikut :



No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2021	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Biasa	292	292	0	90 %	100%	111,11 %
2	Cepat	-	-	-	-	-	-
3	Anak	11	11	0	90 %	100 %	111,11 %
4	Pra Peradilan	1	1	0	90 %	100 %	111,11 %
Total		304	304	0			
Rata – Rata Capaian					90 %	100 %	111,11 %

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dari total 259 perkara pidana yang putus pada tahun 2022, terdapat 13 perkara pidana Biasa yang diputus tidak tepat waktu. Rata – rata capaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 103,62%, melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 93%, sedangkan rata – rata capaian pada tahun 2021 sebesar 111,11%, terdapat penurunan capaian pada tahun 2022 sebesar 7,49% dibandingkan tahun 2021 hal ini disebabkan oleh kenaikan target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2022 sebesar 3%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.4. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu



c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Persentase perkara pidana maupun perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

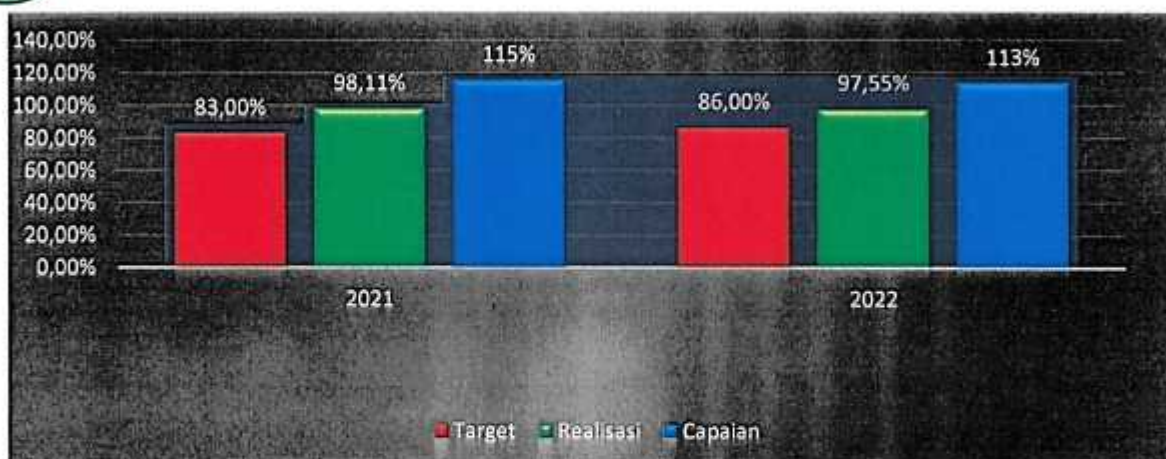
No	Jenis Perkara	Putus 2022	Tidak Banding	Tidak Kasasi	Tidak PK	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	259	245	254	259	86 %	97,55 %	113,43%
2	Pidana Anak	14	14	14	14			
3	Perdata Gugatan	22	20	21	22			
TOTAL		295	279	289	295			

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Putus 2021	Tidak Banding	Tidak Kasasi	Tidak PK	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	292	281	289	292	83 %	98,11 %	115,42 %
2	Pidana Anak	11	11	11	11			
3	Perdata Gugatan	33	29	32	33			
TOTAL		336	321	332	336			

Dari data diatas dapat dilihat, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali di tahun 2022 dengan target sebesar 86%, realisasi sebesar 97,55% dan capaian sebesar 113,43%, hal ini telah melampaui dari target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan nilai capaiannya sebesar 1,99% Pengadilan Negeri Pandeglang menaikkan target untuk tahun 2022 yaitu sebesar 3%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.6. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

d. Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi

Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Proses Diversi	Tidak Diversi	Diversi Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	14	-	14	-	10 %	0 %	0 %
Total		14	-	14	-			

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Proses Diversi	Tidak Diversi	Diversi Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	11	1	10	1	10 %	9,09 %	90,0 %
Total		11	1	10	1			

Dari data diatas dapat dilihat, dengan target sebesar 10% persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi di Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2022 terealisasi sebesar 0% dan capaian sebesar 0%, dengan jumlah perkara anak yang berhasil melalui Diversi sebanyak 0 perkara dari 14 perkara anak yang masuk, hal ini



tidak memenuhi dari target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Jika dibandingkan dengan target yang sama pada tahun sebelumnya, terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2022 untuk nilai realisasi dan nilai capaiannya.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi pada tahun 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.7. Target, realisasi dan capaian persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahun Survei	Jumlah Responden	Target	Realisasi	Capaian
1	2022	141	73%	176,25%	88,98%



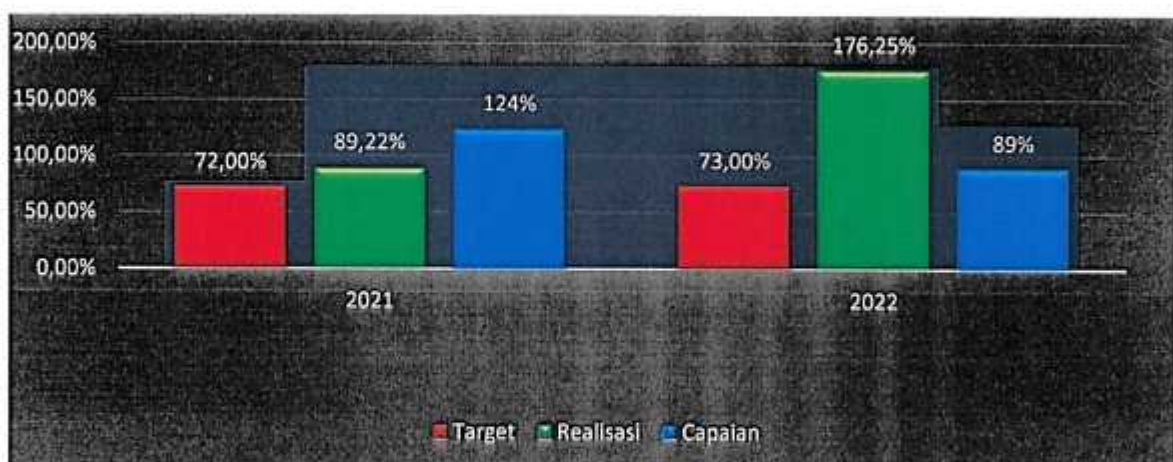
Pada tahun sebelumnya, Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tahun Survei	Jumlah Responden	Target	Realisasi	Capaian
1	2021	276	72 %	89,22 %	123,9 %

Dari data diatas dapat dilihat, dengan target sebesar 73% index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di tahun 2022 terealisasi sebesar 176,25% yang diperoleh dari hasil realisasi semester I sebesar 92.03% yang ditambahkan hasil realisasi Triwulan II sebesar 86,89% yang ditambahkan hasil realisasi Triwulan III Sebesar 88,02% dan yang ditambahkan hasil realisasi Triwulan IV Sebesar 88,98% yang dibagi 4 dan capaian sebesar 88,98%, dengan jumlah responden sebanyak 141 orang, hal ini melampaui dari target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya, terdapat kenaikan capaian pada tahun 2021 sebesar 123,9% hal ini disebabkan meningkatnya jumlah responden yang disurvei oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.8. Target, realisasi dan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan



Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2022 ditampilkan pada data berikut ini:

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Dari total perkara pidana dan perkara perdata (rincian perkara terlampir pada tabel) yang diputus tahun 2022, keseluruhan dari isi putusan perkara tersebut telah diterima oleh para pihak secara tepat waktu, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2022	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Biasa	259	259	0	92%	100%	108,69%
2	Cepat	-	-	-	-	-	-
3	Anak	14	14	-	92%	100%	108,69%
4	Pra Peradilan	-	-	-	-	-	-
Total		273	273	0			

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2022	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	22	22	0	92%	100%	108,69%
2	Permohonan	21	21	0	92%	100%	108,69%
3	Gugatan Sederhana	8	8	0	92%	100%	108,69%
Total		51	51	0			



Pada tahun sebelumnya, persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut :

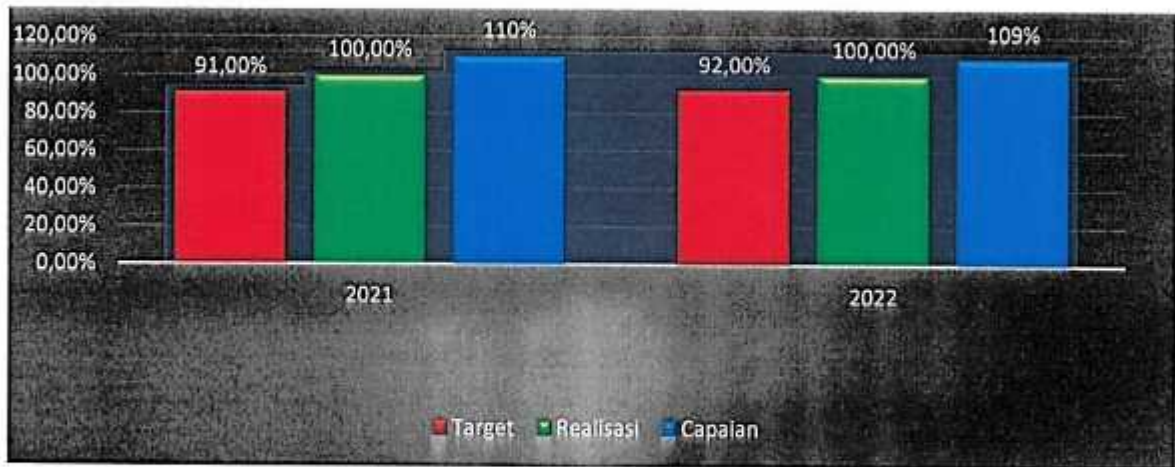
No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2021	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Biasa	292	292	0	91 %	100 %	109,89 %
2	Cepat	-	-	-	-	-	-
3	Anak	11	11	0	91 %	100 %	109,89 %
4	Pra Peradilan	1	1	0	91 %	100 %	109,89 %
Total		304	304	0			

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2021	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	33	33	0	91 %	100 %	109,89 %
2	Permohonan	17	17	0	91 %	100 %	109,89 %
3	Gugatan Sederhana	66	66	0	91 %	100 %	109,89 %
Total		116	116	0			

Dari data diatas dapat dilihat, persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu di tahun 2022 dengan target sebesar 92%, realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 108,69%, hal ini melampaui dari target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Jika dibandingkan dengan target dan capaian tahun sebelumnya, terdapat penurunan capaian pada tahun 2022, hal ini disebabkan Pengadilan Negeri Pandeglang menaikkan target pada tahun 2022 yaitu sebesar 1% dari target tahun 2021. Adapun realisasi persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu antara tahun 2022 dan tahun 2021 sama-sama mencapai angka 100%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.9. Target, realisasi dan capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Mediasi	Dalam Proses	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	24	24	4	1	23	14 %	4,16%	29,71%
Total		24	24	4	1	23			

Pada tahun sebelumnya, Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Mediasi	Dalam Proses	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	19	19	3	1	15	13 %	5,26 %	40,46 %
Total		19	19	3	1	15			

Dari data diatas dapat dilihat, persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2022 dengan target sebesar 14%, terealisasi sebesar 4,16% dan capaian sebesar 29,71%, hal ini sudah mencapai target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang



Jika dibandingkan dengan target dan capaian tahun sebelumnya, terdapat penurunan terhadap realisasi maupun capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.10. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Banding	Kasasi	PK	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	14	5	0	100 %	100%	100%
2	Pidana Anak	0	0	0			
3	Gugatan	2	1	0			
Total		16	6	0			
Tepat Waktu		16	6	0			
Tidak Tepat Waktu		0	0	0			



Pada tahun sebelumnya, persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Banding	Kasasi	PK	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	11	3	0	100 %	100 %	100 %
2	Pidana Anak	0	0	0			
3	Gugatan	4	1	0			
Total		15	4	0			
Tepat Waktu		15	4	0			
Tidak Tepat Waktu		0	0	0			

Dari data diatas dapat dilihat, persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu tahun 2022 dengan target sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 100%, hal ini telah mencapai target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Pada tahun sebelumnya realisasi dan capaian juga mendapat nilai yang sama dengan tahun 2021, hal ini disebabkan Pengadilan Negeri Pandeglang menetapkan target yang sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Adapun realisasi persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu antara tahun 2022 dan tahun 2021 sama-sama mencapai angka 100%.

Keseluruhan berkas upaya hukum pada tahun 2022 diajukan secara tepat waktu ke Pengadilan Tinggi Banten maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.11. Target, realisasi dan capaian persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Selesai	Tidak Selesai	Target	Realisasi	Capaian
1	Prodeo	0	0	0	10 %	0 %	0 %
TOTAL		0	0	0			

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara prodeo yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut :



No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Selesai	Tidak Selesai	Target	Realisasi	Capaian
1	Prodeo	0	0	0	10 %	0 %	0 %
TOTAL		0	0	0			

Dari data diatas dapat dilihat, Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2022 tidak mencapai target untuk indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan, hal ini disebabkan tidak adanya perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2022.

Pada tahun sebelumnya, Pengadilan Negeri Pandeglang juga tidak mencapai target untuk indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan yang disebabkan karena tidak adanya perkara prodeo yang masuk.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini:



Grafik III.12. Target, realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :



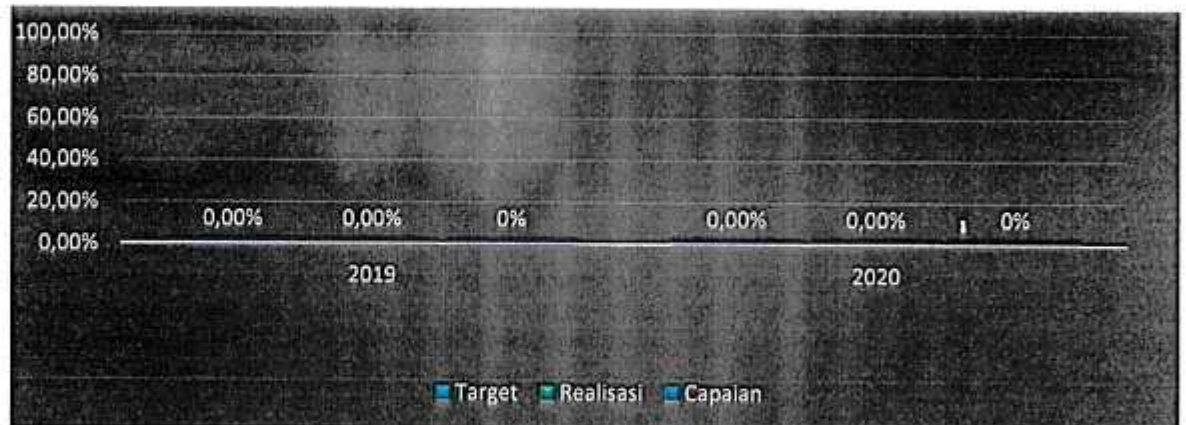
No	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
1	0	0 %	0 %	0 %

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
1	0	0 %	0 %	0 %

Karena Pengadilan Negeri Pandeglang tidak memiliki sarana Gedung untuk mengadakan sidang diluar Pengadilan (Zetting Plaatz) maka persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan baik itu berupa target, realisasi maupun capaian pada tahun 2021 dan 2022 adalah berjumlah 0%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan pada tahun 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.13. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan



c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jumlah Jam Layanan Posbankum 2022	Realisasi Jam Layanan	Sisa Realisasi Jam Layanan	Target	Realisasi	Capaian
1	312 Jam	312 Jam	0 Jam	100 %	100%	100%

Pada tahun sebelumnya, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jumlah Jam Layanan Posbankum 2021	Realisasi Jam Layanan	Sisa Realisasi Jam Layanan	Target	Realisasi	Capaian
1	312 Jam	312 Jam	0 Jam	100 %	100 %	100 %

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terdapat persamaan jumlah jam layanan Posbankum dan juga realisasi jam layanan antara tahun 2022 dan tahun 2021 yaitu 312 jam layanan dan 312 jam realisasi layanan, demikian pula dengan sisa realisasi jam layanan yang jumlahnya sama antara tahun 2022 yaitu 0 jam sisa realisasi dan tahun 2021 yaitu 0 jam sisa realisasi layanan. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) tahun 2022 dengan target sebesar 100%, realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 100%, hal ini sudah mencapai target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Dalam hal pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), Pengadilan Negeri Pandeglang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Jatramada.



Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada tahun 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.14. Target, realisasi dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jumlah Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti 2022	Target	Realisasi	Capaian
1	1	90 %	3,57%	3,97%



Pada tahun sebelumnya, persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jumlah Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti 2021	Target	Realisasi	Capaian
1	0	90 %	0%	0%

Dari data diatas dapat dilihat, persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) tahun 2022 dengan target sebesar 90%, realisasi sebesar 3,57% dan capaian sebesar 3,97%, hal ini belum mencapai target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Jika dibandingkan dengan target dan capaian tahun sebelumnya, terjadi perubahan Kenaikan Tahun 2022. Realisasi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) tahun 2021 adalah sebesar 0% dengan target 90% dan capaian sebesar 0%

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) pada tahun 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.15. Target, realisasi dan capaian persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)



A.1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2022 telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada. Keberhasilan kinerja pada tahun 2022 di beberapa indikator kinerja dikarenakan :

- a. Pengadilan Negeri Pandeglang telah melaksanakan tertib administrasi
- b. Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Monitoring Informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS) yang membantu kinerja dalam penyelesaian perkara
- c. Telah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala baik di kepaniteraan maupun kesekretariatan serta rapat bulanan secara keseluruhan
- d. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian perkara di tingkat pertama

Adapun tidak tercapainya target hanya terjadi pada beberapa indikator yaitu :

- a. Pada indikator penurunan sisa perkara masih tinggi yang diakibatkan karena pengiriman atau pelimpahan berkas perkara khususnya perkara pidana dari kejaksaan dilakukan pada akhir bulan desember 2022 sehingga perkara belum bisa diproses (diputus) dan menjadi tunggakan perkara pada akhir tahun 2022
- b. Pada indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi, hal ini disebabkan keinginan para pihak untuk menyelesaikan secara mediasi sangat kurang padahal mediator sudah berusaha supaya mediasi dapat berhasil
- c. Pada indikator perkara prodeo, hal ini disebabkan tidak adanya perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Pandeglang
- d. Pada indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), hal ini disebabkan karena tidak adanya pihak berperkara yang



mengajukan permohonan eksekusi atas sengketa yang sedang dipermasalahkan.

A.2. Analisa atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2022 jumlah pegawai Pengadilan Negeri Pandeglang sebanyak 37 orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua	= 1 Orang
Wakil Ketua	= 1 Orang
Hakim	= 9 Orang
Panitera	= 1 Orang
Panitera Muda Pidana	= 1 Orang
Panitera Muda Perdata	= 1 Orang
Panitera Muda Hukum	= 1 Orang
Panitera Pengganti	= 8 Orang
Juru Sita	= 1 Orang
Juru Sita Pengganti	= 1 Orang
Sekretaris	= 1 Orang
Kasubbag Umum dan Keuangan	= 1 Orang
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	= 1 Orang
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	= 1 Orang
Pelaksana	= 8 Orang



Mengingat minimnya jumlah Staf Pelaksana pada Pengadilan Negeri Pandeglang maka banyak Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Pandeglang yang merangkap tugas. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya penambahan pegawai, baik untuk di bagian kepaniteraan maupun dibagian kesekretariatan.

A.3. Analisa atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kerja Pengadilan Negeri Pandeglang telah disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang baik kegiatan utama/prioritas maupun kegiatan pendukung. Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Pandeglang untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima. Adapun untuk pencapaian pada tahun 2022 ini diperoleh dengan kerja keras semua Sumber Daya Manusia yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun arahan bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan.

Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi Banten yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh pimpinan sesuai petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Disamping itu adanya pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan kepada pimpinan Pengadilan Negeri Pandeglang, laporan tersebut dapat dijadikan umpan balik dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian.

Terhadap indikator kinerja yang telah mencapai target, Pengadilan Negeri Pandeglang akan berusaha untuk mempertahankan serta meningkatkan, sedangkan



terhadap indikator kinerja yang belum tercapai maka Pengadilan Negeri Pandeglang akan berusaha semaksimal mungkin agar indikator kinerja tersebut mencapai target yang telah ditetapkan

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, ditentukan juga oleh tersedianya anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri atas :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417844) dengan Nomor : DIPA-005.01.2.417844/2022, meliputi Belanja Barang (Perjalanan Dinas), Belanja Pegawai, Belanja Barang (Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran), dan Belanja Modal, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.466.244.000,- yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 4.634.143.000,-, belanja barang sebesar Rp. 1.604.601.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 192.500.000,-
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417845) dengan Nomor :DIPA-005.03.2.417845/2022, meliputi Belanja Barang, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 144.420.000,-

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417844) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417845) yang terdiri dari total pagu, realisasi dan sisa anggaran secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Akun	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa
DIPA 417844 (DIPA 01 Badan Urusan Administrasi)					
BELANJA PEGAWAI					
1	511111	Belanja Gaji Pokok	1.817.254.000	1.803.926.500	13.327.500
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji	33.000	26.791	6.209
3	511121	Belanja Tunj. Suami / Istri	116.300.000	112.795.512	3.504.488
4	511122	Belanja Tunj. Anak	36.000.000	34.283.496	1.716.504
5	511123	Belanja Tunj. Struktural	30.140.000	27.650.000	2.490.000
6	511124	Belanja Tunj.	1.970.776.000	1.960.765.000	10.011.000



		Fungsional			
7	511125	Belanja Tunj. PPH	195.214.000	189.354.694	5.859.306
8	511126	Belanja Tunj. Beras	102.466.000	100.084.440	2,381.560
9	511151	Belanja Tunj. Umum	12.770.000	12.650.000	120.000
10	511129	Belanja Uang Makan	353.190.000	334.193.000	18.997.000
BELANJA BARANG					
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	171.000.000	170.625.000	375.000
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.400.000	3.301.100	2.098.900
3	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	44.760.000	44.760.000	0
4	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	28.708.000	28.698.800	9.200
5	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	81.787.000	81.785.000	2.000
6	522111	Belanja Langganan Listrik	148.488.000	138.695.366	9.792.634
7	522112	Belanja Langganan Telepon	1.200.000	882.919	317.081
8	522113	Belanja Langganan Air	28.000.000	25.472.400	3.327.600
9	522141	Belanja Sewa	151.200.000	150.000.000	1.200.000
10	522191	Belanja Jasa Lainnya	800.000	800.000	0
11	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	391.685.000	391.669.000	16.000
12	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	28.000.000	27.740.000	260.000
13	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142.989.000	141.900.367	1.088.633
14	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.520.000	35.520.000	0
15	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.728.000	4.640.000	88.000



BELANJA MODAL					
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.500.000	27.492.000	8.000
TOTAL			6.466.244.000	6.387.640.403	78.603.597
PERSENTASE			100 %	98,78 %	1,22 %

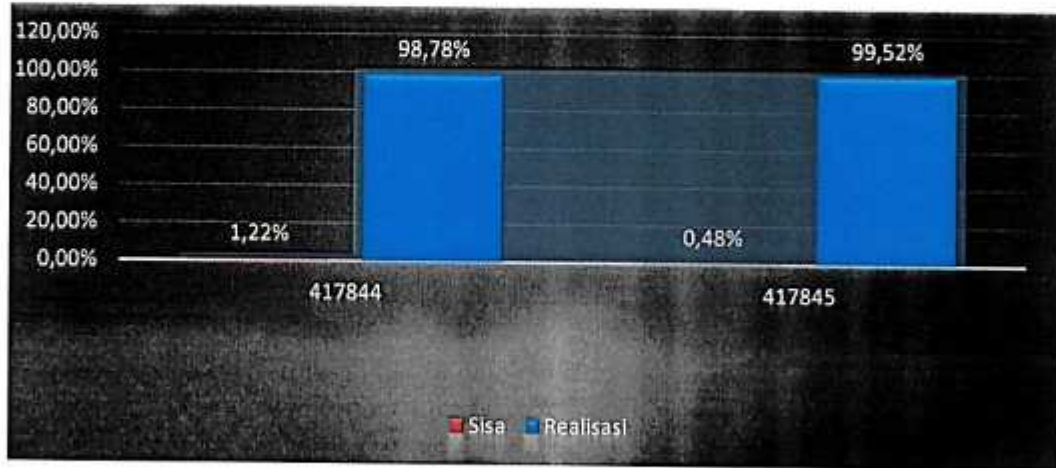
No	Akun	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa
DIPA 417845 (DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum)					
BELANJA BARANG					
1	522131	Belanja Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	0
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	170.000	0	170.000
3	521211	Belanja Bahan	46.730.000	46.655.000	75.000
4	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	13.500.000	13.500.000	0
5	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.200.000	10.200.000	0
TOTAL			144.420.000	143.725.000	695.000
PERSENTASE			100 %	99,52 %	0,48 %

Berdasarkan tabel diatas, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417844) dengan Nomor : DIPA-005.01.2.417844/2022 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.466.244.000,- Realisasi sebesar Rp. 6.387.640.403,- dan Sisa Anggaran sebesar Rp. 78.603.597,- dengan nilai Realisasi Anggaran telah mencapai jumlah sebesar 98,78% dan persentase Sisa Anggaran sebesar 1,22%.

Sedangkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417845) dengan Nomor : DIPA-005.03.2.417845/2022 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 144.420.000,- Realisasi sebesar Rp. 143.725.000,- dan Sisa Anggaran sebesar Rp. 695.000,- dengan nilai Realisasi Anggaran telah mencapai jumlah sebesar 99,52% dan persentase Sisa Anggaran sebesar 0,48%.



Adapun persentase realisasi dan sisa anggaran pada tahun 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.16. Persentase Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2022



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2022 dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.

Secara umum capaian sasaran strategis pada tahun 2022 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkan ada indikator yang mengalami kemajuan yang cukup pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun ada juga indikator yang belum mencapai target yang diharapkan.

Dari ke-4 (empat) sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, persentase capaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2022 mengalami kemajuan dari tahun sebelumnya. Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase capaian sasaran tersebut menunjukkan bahwa secara umum selama tahun 2022 pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Pandeglang sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih dijumpai permasalahan dan kendala yang berhubungan dengan permasalahan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana prasarana sebagai faktor penunjang.



Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran dalam laporan kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap komponen aparaturnya.

Upaya koordinasi dan kerjasama itu penting mengingat keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai kalangan masyarakat pencari keadilan.